

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA MANADO

Anna Feberina Ginting
Salmin Dengo
Helly F. Kolondam

The Social Security National is a system of the implementation of the country and the government to provide social protection, so that each of the population meet the basic needs of the life, to the realization of social welfare for the entire population of Indonesia. The type of the social security encompasses health insurance, guarantee the accident, death, the old days, retirement. Implementation of the 5 (five) programs of social security in the social security system of national is expected to reach membership of the labor force are widely an ongoing basis, so that the people can meet basic needs as well as a guarantee of living either working in the formal and informal. The program guarantees social employment be seen from 4 of the implementation according to Edward III that is communication, resources, disposisi, and the structure of bureaucracy.

The research is using the method of approach to a qualitative descriptive through in-depth interviews to the 10 people was an informer. Observation and the additional documents in the form of a list of guidelines for the interview, tape recorder, and the paper.

The result showed that in general the implementation of the guarantee of employment is not good.

Keyword: Implementation of labor social security program

PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial dideklarasikan oleh PBB sebagai salah satu hak asasi manusia dan kemudian menjadi konvensi internasional, khususnya yang di

promosikan oleh *International Labour Organization* (ILO) yang sangat aktif memperjuangkan agar seluruh penduduk memiliki jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Indonesia adalah negara pihak yang meratifikasi konvensi-konvensi ILO dan konvensi hak-hak asasi manusia sehingga Indonesia harus terus menyempurnakan sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial yang digunakan oleh banyak negara, umumnya mengacu

pada konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Terlaksananya 5 (lima) program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional diharapkan dapat menjangkau kepesertaan tenaga kerja secara luas dan berkesinambungan, sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar serta jaminan hidup yang layak baik yang bekerja di sektor formal dan informal. Sektor formal adalah penduduk yang bekerja di perusahaan atau badan-badan lain yang secara formal memiliki usaha, dan operasi dan sebagainya dengan ikatan/kontak kerja yang dibuat secara formal.

Sedangkan sektor informal adalah penduduk yang bekerja dalam usaha perorangan atau badan-badan yang dengan standar hukum tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan ikatan kerja tidak secara resmi diikat oleh suatu kontrak tertulis atau peraturan tertulis. Kelompok kerja informal termasuk pedagang, pengecer, petani, nelayan dan sebagainya. Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ketenangan dalam bekerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana teknis, administratif, dan operasional baik dari badan penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri.

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak, pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja atau pengusaha. Pembiayaan jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan juga

menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggungjawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan pembiayaan jaminan hari tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha dan tenaga kerja karena telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dan sekaligus merupakan tabungan tenaga kerja untuk hari tuanya.

Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan wajib dipatuhi oleh pengusaha dan tenaga kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun-tahun sebelumnya, penduduk usia kerja di Sulawesi Utara yang masuk angkatan kerja berjumlah 1.082.203 orang, dan angkatan kerja yang tercatat berjumlah 990.720 orang yang sedang bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja berjumlah 575.611 orang dan dari bukan angkatan kerja yang ada tercatat 135.968 orang yang bersekolah dan 365.182 orang yang mengurus rumah tangga.

Sebanyak 107 ribu pekerja di Kota Manado yang terdaftar sebagai peserta

jaminan sosial ketenagakerjaan dari 1, 1 juta jumlah pekerja atau jika di presentasikan sekitar 6 %. Minimnya pekerja yang terdaftar dapat dilihat dari kurangnya perusahaan dan tenaga kerja yang terdaftar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado. Perusahaan yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baru sebanyak 2.825 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 63.893 orang. Perusahaan yang mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan jika terjadi risiko kerja terhadap pekerjaannya secara ekonomi maka beralih tanggung jawab kepada pihak penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Mengenai upaya penambahan kepesertaan sepanjang 2015 tidak satupun sektor yang ditargetkan tercapai. Misalnya dari target penyaringan 1.332 perusahaan, hanya terealisasi 1.246 perusahaan.

Sementara itu, untuk target tenaga kerja formal sebanyak 47.451 orang, hanya terealisasi 45.266 tenaga kerja. Untuk sektor informal lebih jauh dari harapan, dari target 26.000 tenaga kerja hanya terealisasi 2.364 tenaga kerja. Jumlah pekerja sektor informal mencapai 80 juta atau 75% dari total jumlah pekerja sebanyak 120 juta. Hal ini didorong jumlah pekerja sektor informal lebih

banyak dibanding sektor formal. Serta pendaftaran perusahaan dan pekerja harus dimaksimalkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Manado masih terdapat beberapa kelemahan. Dilihat dari segi komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi terinci kepada masyarakat dan perbedaan pemahaman mengenai jaminan sosial kesehatan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi kepada seluruh publik (peserta) sangat penting dilakukan khususnya bagi tenaga kerja informal. Kelemahan yang lain yaitu dari sisi masyarakat yang kurang aktif dan peduli dengan pentingnya asuransi kesehatan. Serta pembayaran iuran asuransi harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan pendapatan rata-rata tiap keluarga untuk mempermudah peserta membayar iuran tiap bulannya.

Berdasarkan sikap dan komitmen/disposisi dari implementor terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat dilihat dari sikap karyawan dalam pemberian pelayanan kepada peserta di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado. Melihat kondisi pelayanan di kantor belum maksimal dibutuhkan pelatihan dan

perubahan mind-set pegawai BPJS, serta perekrutan calon pegawai BPJS, terutama di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado.

Dilihat dari struktur birokrasi harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik), manajemen program penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Manado harus berkualitas baik dikelola oleh orang yang tepat untuk posisi yang tepat, pengangkatan manajer ke atas dalam BPJS haruslah bersifat terbuka. Setiap posisi manajer, kepala cabang, kepala regional, dan direksi BPJS bisa diisi oleh siapapun (tidak harus dari dalam BPJS) yang memenuhi kompetensi dan cakap untuk tugas-tugas tersebut. Dilihat dari peraturan pembayaran iuran diperlukan sanksi yang tegas, karena masih terdapat peserta yang telat membayar iuran sesuai yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya masalah tersebut maka peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian tentang 'Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado'.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006: 65), "implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang”.

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010:87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan salah satu program pemerintah yang di buat untuk menanggulangi risiko-risiko pada saat bekerja. Menurut Kenneth Thomson (1980), Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa

tersebut, serat jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985:2), menyatakan bahwa tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan pengangguran atau sedang mencari kerja. Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas: 1) golongan yang bersekolah, 2) golongan yang mengurus rumah tangga, 3) golongan lain lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007), Mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan penelitian kualitatif menekankan pada segi fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakangi.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Manado. Yang dilihat dari komunikasi, resource (sumberdaya), sikap/disposisi, dan struktur birokrasi dalam melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian adalah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian direncanakan dilakukan mulai tanggal 27 juni sampai 28 Juli 2016.

D. Sumber Data

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan objek penelitian maupun melalui pengamatan secara langsung di

dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang telah tersedia dari hasil pengumpulan data instansi terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari pendataan dokumen arsip-arsip, laporan-laporan, catatan-catatan tentang implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2009: 97). Jumlah informan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Informan yang diteliti terdiri dari 1 orang kepala kantor, 1 orang kepala bagian pelayanan umum, 3 orang pegawai kantor, 1 orang manajer/pimpinan perusahaan Matahari, 3 orang karyawan perusahaan Matahari peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 1 orang HRD perusahaan Matahari. Informasi yang diperoleh dari para informan tersebut dianggap cukup

sehingga tidak dilakukan lagi penambahan informan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan keterangan secara lisan mengenai implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2) Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan

pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, catatan-catatan, dan laporan-laporan seperti Profil Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado, sejarah jaminan sosial ketenagakerjaan, visi dan misi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado, data pegawai Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado, struktur organisasi, tugas dan fungsi dari susunan organisasi serta manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

3) Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap proses implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Manado. Dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian dapat melihat dan mengamati sendiri proses implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

G. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk naratif.
3. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif dimulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam

catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetapi terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci.

Hasil wawancara tentang implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Manado yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: 1) Komunikasi: yaitu informasi yang diberikan kepada pegawai/staff dalam pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado sudah jelas dan dapat dipahami dengan baik dalam melaksanakan tugas. Tetapi masih ditemui kendala yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja yang masih ada belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Serta kepedulian tenaga kerja terhadap informasi-informasi yang ada. 2) Sumber daya: yaitu sarana dan prasarana pendukung pelayanan sudah memadai seperti fasilitas ruangan yang ada, komputer, AC, ruang administrasi, printer, peralatan pemrosesan data dan sarana pendukung pelayanan lainnya serta

anggaran dana yang cukup untuk menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk jumlah pegawai/staff pelaksana masih kurang, diperlukan penambahan pegawai baru. 3) Disposisi/ Sikap: para pegawai pelaksana program jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Manado adalah orang-orang yang berkompeten dan mempunyai komitmen tinggi terhadap keberhasilan dari pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tetapi masih perlu ditingkatkan karena masih ada pegawai yang lambat bekerja dalam memberikan pelayanan di kantor. 4) Struktur Birokrasi: Struktur Birokrasi yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado sudah bagus dan tertata dengan jelas. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas sesuai dengan SOP dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai pedoman tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab IV tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado dapat di

tarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

Proses implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Manado dilihat dari empat aspek penting yang di kemukakan oleh Edward III, yaitu 1) Komunikasi: secara umum komunikasi antara kepala pimpinan dengan pegawai/staff pelaksana sudah jelas serta mudah di pahami serta instruksi atau perintah pimpinan terhadap staff pelaksana di sampaikan dengan baik. Tetapi sosialisasi dari pihak penyelenggara mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja belum berjalan dengan baik. 2) Sumber daya: fasilitas- fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti anggaran dana, fasilitas ruangan yang ada, komputer, AC, ruang administrasi, printer, peralatan pemrosesan data dan sarana pendukung pelayanan lainnya sudah memadai. Dilihat dari jumlah pegawai/staff pelaksana di kantor masih kurang. 3) Disposisi: dilihat dari sikap pegawai/staf pelaksana, bahwa masih ada pegawai yang lambat bekerja dalam proses pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan sehingga membutuhkan waktu yang lama. 4) Struktur Birokrasi: dilihat dari struktur organisasi pelaksana/

pembagian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah baik dan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, sosialisasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja (publik) perlu ditingkatkan.
- 2) Sumber daya, melihat jumlah pegawai yang kurang, pihak penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Manado perlu melakukan perekrutan calon pegawai baru.
- 3) Disposisi, sikap dari pegawai/staff pelaksana lebih ditingkatkan dalam memberikan pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado.
- 4) Struktur Birokrasi: Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah baik dan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan perlu dipertahankan.

Daftar Pustaka

- Bogdan dan Taylor, 2007 dalam J. Moleong Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Aksara.
- Mazmanian, Daniel C. dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York : Herper Collins.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Simanjuntak, J .Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Penerbit FEUI (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia): Jakarta.
- Thomson, Kenneth. 1980. Dalam kuliahnya pada Regional Training ISSA, seminar tanggal 16 dan 17 Juni mengemukakan *Perumusan Jaminan Sosial*.
- Van Meter, Donald S. Dan Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Proses. Administration dan Society Journal*.
- Sumber Lain:**
https://i.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional#Referensi.
Diakses juli 31. 2016.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional